

## **Inflasi Bitung Turun 0,66%, Maurits Mantiri: Tetap Fokus dan Lakukan Inovasi**



*<http://beritamanado.com>*

Bitung, – Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Selasa (24/1/2023).

Rapat itu diikuti Wali Kota bersama sejumlah pejabat di Ruang Rapat Kerja Wali Kota Bitung. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan, inflasi<sup>i</sup> Indonesia berada di angka 5,51%. Sementara inflasi Provinsi Sulawesi Utara berada di angka 4,00%.

Hal itu, kata dia, menunjukkan Provinsi Sulawesi Utara termasuk daerah yang mampu dan konsisten dalam mengendalikan inflasi sejauh ini.

“Data per Desember 2022, di Asia Tenggara, Indonesia menduduki nomor 7 angka Inflasi dan yang tertinggi adalah Laos dengan angka 39,27%,” kata Tito.

Kepala Badan Pangan Indonesia, Arief Prasetyo Adi, mengatakan komoditas yang harus dijaga saat ini adalah beras, bawang merah dan minyak goreng. Sementara telur, daging ayam dan daging sapi masih relatif stabil.

Arief meminta seluruh kepala daerah agar mengontrol harga dan ketersediaan kebutuhan yang harus dijaga dengan segera melakukan intervensi agar harga tidak naik.

Sementara itu, Wali Kota kembali mengingatkan untuk tetap menjaga apa yang sudah dilakukan agar inflasi di Kota Bitung bisa dikendalikan dengan baik. Mengingat angka inflasi di Kota Bitung turun di angka 0,66%.

“Data dari Bagian Perekonomian Kota Bitung, angka inflasi kita turun di angka 0,66%. Tetap fokus dan lakukan inovasi untuk mengendalikan inflasi hingga bisa terus ditekan,” kata Maurits.

Hadir juga dalam rapat itu sejumlah pejabat seperti Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bitung, Asisten II Setda Kota Bitung, Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Kepala Bappeda Kota Bitung, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bitung, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung, Kepala Badan Keuangan Kota Bitung, Kepala Dinas Pertanian Kota Bitung, Kepala Badan SDA Kota Bitung dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Bitung.

### **Sumber:**

1. *beritamanado.com*, Inflasi Bitung Turun 0,66%, Maurits Mantiri: Tetap Fokus dan Lakukan Inovasi, 25 Januari 2023.
2. *manado.tribunnews.com*, Ikut Rakor Pengendalian Inflasi, Ini Pesan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, 24 Januari 2023.

### **Catatan:**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Nasional (Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional) yang terdiri dari:

- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat (2) s.d ayat (4) Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan susunan yaitu: dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi, yang dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;

- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6 ayat (3) Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah (Pasal 8 huruf c Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional).

Mengenai unsur-unsur dalam Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa paling sedikit meliputi:

- a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
- b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
- d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
- e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

---

<sup>1</sup> Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang (Kamus Besar Bahasa Indonesia).